

# MARI MENJADI WAJIB PAJAK YANG PATUH

Disusun oleh :

Nanik Ermawati, SE, M.Si

Zaenal Afifi, SE, M.Si



Dibiayai oleh : Direktorat Riset & Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,  
Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian :  
Nomor : 49/Lemlit.UMK/B.07.08/II/2018



# MARI MENJADI WAJIB PAJAK YANG PATUH

Disusun oleh :

Nanik Ermawati, SE, M.Si

Zaenal Afifi, SE, M.Si



# MARI MENJADI WAJIB PAJAK YANG PATUH

Disusun oleh :

Nanik Ermawati, SE, M.Si

Zaenal Afifi, SE, M.Si



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan bahan ajar ini dengan baik.

Bahan ajar ini, merupakan luaran dari penelitian kami yang berjudul pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi, selain itu bahan ajar ini juga merupakan referensi tambahan dalam mata kuliah perpajakan. Diharapkan dengan adanya bahan ajar ini mahasiswa dan orang yang membacanya menjadi orang yang lebih patuh dalam membayar pajak.

Dalam penyusunan bahan ajar ini, kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan bahan ini sehingga kami dapat menyelesaikannya. Dan yang paling khusus kami ucapkan terima kasih kepada Kemenristek DIKTI yang telah memberikan dukungan

finansial terhadap penelitian kami sehingga penelitian kami berjalan dengan lancar dari awal sampai terwujudnya bahan ajar ini.

Selanjutnya, penulis berharap semoga kehadiran bahan ajar ini dapat memperkaya khasanah dan wawasan tentang pengertian Ilmu Pengetahuan, khususnya hal-hal yang berbasis perpajakan. Oleh karena itu penulis mengharapkan dukungan berupa kritik dan saran agar dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Nanik Ermawati, SE, MSi

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
Apa Itu Pajak? .....	1
❖ Fungsi Pajak.....	2
❖ Pengelompokan Pajak.....	3
❖ Sistem Pemungutan Pajak.....	5
❖ Cara Pemungutan Pajak .....	6
❖ Asas Pemungutan Pajak .....	7
❖ Asas Untuk Memungut Pajak Penghasilan.....	7
Pajak Penghasilan Final .....	8
Dasar Hukum.....	13
Objek Pajak .....	15
Besarnya Tarif Pajak.....	17
Sanksi Pajak.....	19
Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	23




## **MARI MENJADI WAJIB PAJAK YANG PATUH**

### **Apa Itu Pajak?**

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip dari buku Perpajakan karangan Dr. Mardiasmo, MBA,. Ak (2011:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. P. J. A. Adriani dikutip dari buku Perpajakan Indonesia karangan Dr. Waluyo, M.Sc., Ak (2011:2): Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.






Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

#### ❖ **Fungsi Pajak**

- Fungsi Penerimaan (Budgetair): Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang




sebanyak–banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain–lain.

- Fungsi Mengatur (Reguler): Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

#### ❖ **Pengelompokkan Pajak**

1. Menurut golongan :
  - Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan



kepada orang lain atau pihak lain. Contoh:  
Pajak Penghasilan (PPh).

- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifat :

- Pajak subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak obyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subyek pajak

(Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.  
Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungut :

- Pajak Pusat, yaitu pajak yg dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, BPHTB serta Bea Materai.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yg dipungut oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

❖ **Sistem Pemungutan Pajak**

1. Official Assessment System: sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2. Self Assessment System: sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. Withholding System: sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

#### ❖ **Cara Pemungutan Pajak**

1. Stelsel nyata (*riil stelsel*): pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*): pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun

pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.


3. Stelsel campuran: merupakan perpaduan antara *Fictive Stelsel* dengan *Riil Stelsel*. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung dengan anggapan penghasilan sama dengan tahun sebelumnya, kemudian diakhir tahun pajak akan dikoreksi berdasarkan objek yang sesungguhnya.

#### ❖ **Asas Pemungutan Pajak**

1. Asas menurut falsafah hukum, hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan.
2. Asas yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
3. Asas Ekonomi. Pemungutan pajak tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat.

#### ❖ **Asas Untuk Memungut Pajak Penghasilan**

1. Asas sumber: negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan di mana




tempat tinggal Wajib Pajak apakah di wilayahnya atau di luar wilayahnya.

2. Asas domisili: Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
3. Asas kebangsaan: Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak.


### **Pajak Penghasilan Final**

Resmi (2011:139) mengemukakan pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh , pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- 
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  2. Penghasilan berupa hadiah undian
  3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pegalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).






Secara umum definisi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tidak ratus juta rupiah).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:


1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk, tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah sebagai berikut:

- 
1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dan hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang tersebar diseluruh pelosok pedesaan termasuk diwilayahwilayah yang relatif terisolasi.
  2. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
  3. Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.


## **Dasar Hukum**

Dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa pemotong PPh adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi;
- 2) Penyelenggara kegiatan;
- 3) Otoritas bursa; dan
- 4) Bendaharawan.

Lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penerima hadiah undian;
3. Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan
4. Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan.



Keterangan lain-lain dari Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final;
2. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan;
3. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final;

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 17 ayat (7) UU PPh yang berbunyi:

"Dengan Peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak memenuhi tarif pajak tertinggi sebagai mana dimaksud pada ayat (1)."


Objek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun;
2. Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
3. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

### **Objek Pajak**

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:


1. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
2. Pemain musik, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;

- 
5. Pengarang, peneliti dan penerjemah;
  6. Agen iklan;
  7. Pengawas atau pengelola proyek;
  8. Perantara;
  9. Petugas penjaja barang dagangan;
  10. Agen asuransi, dan
  11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi-level marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Subjek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:


- 
1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
  2. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,-

### **Besarnya Tarif Pajak**

#### Tarif Pajak

1. Tarif pajak sebanding/proporsional  
Tarif berupa prosentase tetap, terhadap berapapun jumlahnya yang dikenai pajak sehingga besarnya





pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif pajak tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlahnya yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang.

3. Tarif pajak progresif

Tarif pajak yang prosentasenya semakin besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

4. Tarif pajak regresif

Tarif pajak yang prosentasenya semakin kecil apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

## Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 Wajib Pajak Pribadi

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (NPWP)	Tarif Pajak (Non NPWP)
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5 %	6%
2	Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%	18%
3	Diatas Rp 250.000.00 s/d Rp 500.000.000	25%	30%
5	Diatas Rp 500.000.000	30%	36%

### Sanksi Pajak


Dalam pelaksanaan pajak terdapat sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pajaknya. Adapun sanksi pajak meliputi:

Administratif

1. Sanksi denda
2. Saksi Bunga
3. Sanksi kenaikan

Pidana

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan



Menurut Ps. 39 UU. No. 28/2007 Pidana penjara ditetapkan bagi wajib pajak karena adanya tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Contoh:

- a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP.
- b. Tidak menyampaikan SPT.
- c. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
- e. Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar.
- f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya.
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara.


Selanjutnya bagi tindakan pelanggaran perpajakan Selain dipenjara,ada juga sanksi kurungan sesuai dengan Ps 38 UU NO. 28/2007.

Contoh pidana kurungan:

- a. Tidak menyampaikan SPT.
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang sisinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.
- c. Sanksi dipidana kurungan antara 3 bulan sampai 1 tahun dan atau denda antara 1-2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (bila dilakukan pertama kali maka tidak ada sanksi pidana).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam mematuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak berusaha untuk membayar



pajak tepat waktu, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT Tahunan.

Menurut Widagsono (2017), kepatuhan pajak dibagi dalam 2 hal yaitu: 1). Kepatuhan Formal, 2). Kepatuhan Material.

Kepatuhan formal yaitu wajib pajak akan berusaha mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, misalnya: wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya tanpa memperhatikan apakah SPT yang dilaporkan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini wajib pajak hanya sekedar mematuhi peraturan untuk melaporkan saja untuk menghindari denda pajak.

Kepatuhan material adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan, misalnya: wajib pajak melaporkan SPT Tahunan sebelum 31 Maret tahun berikutnya dengan jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Widagsono, 2017). Faktor internal terdiri dari: niat berperilaku tidak patuh, religiusitas, pengetahuan, norma moral. Faktor eksternal terdiri dari: sanksi pajak, norma sosial, kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco. Bandung.
- Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, 2012. *Perpajakan Indonesia (Buku 2 Edisi 10)*. Salemba Empat, Jakarta.